**CAPAIAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**Ria Natasya Herlin Lauw1**

**Agustinus Salle2**

**Ulfah R. Muslimin3**

[*ulfahlud@gmail.com*](mailto:ulfahlud@gmail.com)

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih**

***ABSTRACT***

*This research aims to determine the criteria achieved in implementing SIPD in Jayawijaya Regency and what obstacles were faced during the implementation process. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data in this research was obtained from 7 informants. The data collection techniques are observation, interviews, literature study and documentation. The analysis tool is qualitative descriptive. The interview results were processed using Voyant Tools to be able to see what words appeared most often during the interview*. *The results of this research show that the criteria based on policy implementation proposed by Van Meter and Van Horn have been implemented although there are still several obstacles. The implementation achievements based on the effectiveness theory put forward by Duncan are quite good, although in implementation there are several obstacles such as the network and the SIPD menu which are not yet perfect. The inhibiting factors found in the research are that the quality of human resources needs to be improved, and network errors still occur.*

***Keywords*:** *achievements, effectiveness, implementation, sipd*

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan, pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan pekerjaan yang sangat kompleks sehingga memerlukan suatu sistem yang terpadu untuk mengefektifkan program pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menginisiasi program aplikasi untuk mempercepat kompleksitas perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang dikenal dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. SIPD adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh Kemendagri. SIPD ditetapkan pertama kali lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Permendagri 70/2019). Dikutip dari bpk.go.id Permendagri tersebut telah disosialisasi dan ditetapkan pada tanggal 25 September 2019 dan diundangkan pada tanggal 27 September 2019 dan mulai dilaksanakan tahun 2021 di Kabupaten Jayawijaya. SIPD bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

SIPD adalah sebuah aplikasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah serta sistem pemerintahan lainnya termasuk sistem pembinaan dan pengawasan daerah. Sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintah yang saling terhubung dan terintegrasi, tujuan dari sistem ini adalah untuk menyinergikan substansi Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah. Namun aplikasi yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri ini tidak luput dari ketidak sempurnaan. Ternyata masih ditemukan kendala-kendala seperti sering terjadinya *error system,* kurangnya koordinasi antar pelaksana SIPD, sering kali terjadi salah input karena terlalu banyak menu yang harus diisi sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian terhambat, dan hambatan lainnya dalam penyusunan anggaran kas, serta hambatan dalam pembuatan SPD, SPJ, SPP, SPM, dan SP2D (Nasution, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Citra (2023) hasil penelitian menunjukan bahwa kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait SIPD, menu SIPD yang belum sempurna atau maksimal, dan keterlambatan perbaikan dari pusat menjadi penghambat penerapan SIPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hal yang sama terjadi di Provinsi Papua, di kutip dari bpk.go.id upaya Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) berlakukan SIPD tahun 2021 belum dapat terealisasi pasalnya sistem ini masih bermasalah. Menurut Wakil Gubernur (WaGub), Papua adalah satu-satunya provinsi yang mengikuti sistem ini sampai mengirimkan tenaga ke Yogyakarta untuk bertemu dengan tim IT tetapi belum bisa. SIPD mengatur beberapa informasi terkait dengan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya, namun sistem ini masih di anggap bermasalah sehingga harus kembali pada sistem yang lama yaitu (SIMDA-RED).

Kabupaten Jayawijaya merupakan Ibukota Provinsi Papua Pegunungan, yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Kabupaten Jayawijaya sendiri terbentuk pada tahun 1969 berdasarkan UU No. 12 Tahun 1969. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 yang dikutip dari jayawijaya.go.id ditemukan beberapa masalah yaitu pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 wajib menggunakan aplikasi SIPD tanpa didahului sosialisasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

* 1. **Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa kriterita yang perlu di capai dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Jayawijaya?
2. Bagaimana capaian dari penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Jayawijaya?
3. Kendala apa yang dihadapi selama penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Jayawijaya?
   1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pencapaian dari penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam pelaporan keuangan di Kabupaten Jayawijaya.
2. Untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi selama penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam pelaporan keuangan di Kabupaten Jayawijaya
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Jayawijaya
4. **TINJAUAN PUSTAKA**
   1. **Teori Implementasi**

Implementasi ialah realisasi atau aksi kerja nyata dari suatu rancangan yang telah disusun secara bertahap dan rinci. Implementasi berasal dari bahasa inggris *“implement”* yang berarti pelaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan yang berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan dan penerapan kewajiban. Istilah implementasi merujuk pada beberapa kegiatan yang mengikuti pernyataan dengan maksud tujuan program dengan hasil yang diinginkan oleh pejabat ataupun pemerintah (Nasution & Nurwani, 2021).

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Kesimpulannya implementasi dengan kata lain adalah penerapan dimana dalam kata implementasi diharapkan untuk mengikuti sejumlah aturan yang telah di tetapkan dengan tujuan guna mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam proses kebijakan publik implementasi/penerapan kebijakan menjadi tahapan yang sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Implementasi dapat di sebut dengan pernyataan kebijakan (policy statement) dimana terdapat kebijakan yang di putuskan akan dilaksanakan melalui beberapa langkah yang konkrit (Nasution & Nurwani, 2021). Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2007:144) pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menerapkan kebijakan guna mencapai tujuan, kebijakan, dan program adalah makna implementasi jika dipandang secara luas.

*A Model of the Policy Implementation* adalah model pendekatan implemenasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Model ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear atau tertuju untuk keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi
   1. **Efektivitas**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha komersial yang melibatkan kegiatan perdagangan. UMKM dapat didirikan oleh perorangan atau perusahaan dimana usaha tersebut masuk dalam kriteria skala kecil atau mikro. Pada tahun 1998, usaha dengan skala kecil dan menengah umumnya mampu bersaing dengan perusahaan besar karena sebagian besar usaha kecil tidak bergantung pada pinjaman modal yang besar, sehingga mereka terpengaruh dan memasuki krisis. Saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Seiring waktu, masyarakat semakin kreatif dalam menjalankan bisnis mereka. Sebagian UMKM saat ini menggunakan platform marketplace atau media sosial untuk memasarkan produk dan layanan jasa mereka.

* 1. **Efektivitas**

Efektif berasal dari bahasa inggris “effective” yang artinya berhasil, dengan kata lain sesuatu yang berhasil dilakukan. Efektivitas umumnya dilihat sebagai tingkat pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang dapat direalisasikan. Efektivitas adalah sebuah ukuran terkait seberapa baik tujuan atau seberapa tepat sasaran yang telah ditetapkan akan dapat direalisasikan (Alijoyo, 2000). Pada dasarnya, efektivitas adalah tingkat pencapaian sebuah tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Tabel 2 . Ukuran Efektivitas

|  |  |
| --- | --- |
| **Persentase Efektivitas** | **Kategori** |
| >100% | Sangat Efektif |
| 90-100% | Efektif |
| 80-90% | Cukup Efektif |
| 60-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

* 1. **Sistem Informasi Pemerintah Daerah**

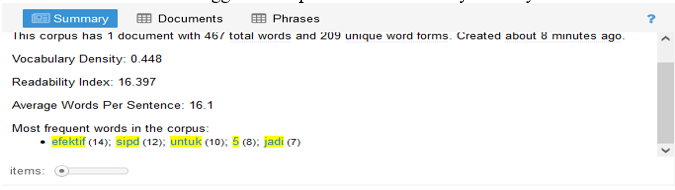
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasi, administrasi dan juga mengelola data serta menjadikannya menjadi sebuah informasi yang disajikan kepada masyarakat dan juga sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan dan juga evaluasi pemerintah daerah. Dengan diselenggarakannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu nasional sangat penting diwujudkan menuju *Good Governance* dan menghasilkan suatu daya yang akurat dan juga terintegrasi mulai dari daerah hingga ke pusat. SIPD diciptakan guna memudahkan pekerjaan ditiap derah. Efektif, efisien, ekonomis, akuntabel, dan transparan adalah tujuan dibentuknya SIPD.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Deskriptif kualitatif adalah riset atau penelitian yang bersifat analisis dan berdasarkan fakta dan fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2016: 108). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di BPKAD Kabupaten Jayawijaya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka, jurnal buku, dll sebagai penunjang hasi penelitian.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

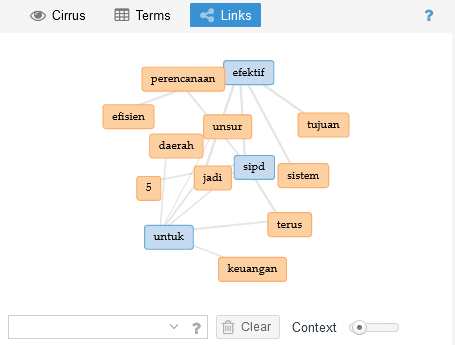
Hasil wawancara diolah menggunakan aplikasi berbasis web yaitu Voyant Tools.



**Gambar 1. Summary Voyant Tools**

Sumber: Data diolah, 2024

*Summary* pada gambar diatas menunjukan berapa banyak kata yang terulang dalam percakapan pada wawancara. Hal menunjukan bahwa berdasarkan penggunaan SIPD efektif dalam membantu sistem pelaporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Jayawijaya meskipun masih belum optimal.



**Gambar 2. Link Voyant Tool**

Sumber: Data diolah, 2024

Link pada Voyant Tools menunjukan keterkaitan antara kata-kata yang paling sering muncul pada saat wawancara berlangsung.

1. **Kriteria yang dicapai dalam penerapan SIPD terhadap pelaporan keuangan**

Terdapat 6 indikator dalam teori *A model of the Policy Implementation* yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn. Dalam teori implementasi dijelaskan bahwa implementasi kebijakan diukur kedalam 6 indikator yaitu, standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi.Sistem ini dibuat dan diimplementasikan untuk membuat pekerjaan lebih efektif, efisiensi, transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan kata lain dengan adanya sistem ini untuk mempernudah pekerjaan dari pengguna sistem ini. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui pencapaian dari penggunaan SIPD terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Jayawijaya dengan melihat 6 indikator dalam teori ini.

1. Standar dan sasaran kebijakan

Seperti yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn, salah satu cara untuk mengukur kinerja kebijakan adalah dengan menetapkan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Pada dasarnya, kinerja kebijakan adalah penilaian atas ketercapaian standar sasaran tersebut. Peluncuran sistem ini disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunaannya, sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses bekerja dari para pengguna sistem. Tujuan dibentuknya sistem ini adalah untuk mempermudah proses kerja suatu daerah oleh karena itu Kemendagri mengeluarkan sistem yang bernama Sistem Informasi Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Dalam hasil penelitian di BPKAD Kabupaten Jayawijaya menunjukan bahwa Kabupaten Jayawijaya telah menggunakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri, seperti yang dikatakan dalam wawancara bersama Bapak Kaban:

*“Tahun 2021 kami sudah mulai menggunakan SIPD, namun belum sepenuhnya kami menggunakan dua aplikasi yaitu SIPD dan sistem kami yang lama. Nah tahun 2022 baru kami sepenuhnya menggunakan SIPD sampai pada hari ini”(KI 2, 22 Agustus 2023)*

Adapun pernyataan dari Kabid Pendapatan BPKAD Kabupaten Jayawijaya bahwa SIPD dalam penerapannya membantu proses penginputan:

“*Kalau kita lihat SIPD ini dari 5 unsur ini sudah terpenuhi. Hanya saja SIPD ini kan hal baru buat kita, karena pemerintah pusah buat aplikasi ini kan untuk semua daerah daerah. Baru dijalankan ditahun kemarin SIPD ini lalu kita gunakan ini jugakan seperti yang tadi saya katakana ini hal baru untuk kita sehingga diseluruh Indonesia terutama kita di Provinsi Papua kalau tidak salah di Jayawijaya, Yapen dan Dogiay yang sudah menggunakan SIPD. Tetapi dari 3 ini 2 ini mundur hanya kita Jayawijaya saja yang masih jalan”(KI 7, 23 Agustus 2023)*

Dari keterangan informan atau narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Kementrian telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini BPKAD Kabupaten Jayawijaya. Walaupun dalam pelaksanaan penerapan masih ditemui banyak kendala dikarenakan oleh sistem yang belum sempurna.

*“Persoalannya SIPD yang ada sekarang itu belum sempurna. Jadi bukannya mempermudah dan menolong tetapi menyulitkan kami.”(KI 2, 22 Agustus 2023)*

Penyempurnaan penerapan masih perlu revisi atau perbaikan untuk dapat mendapatkan versi terbaik dari SIPD. Dari keterangan informan atau narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh Kementrian telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini BPKAD Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2021.

1. Sumber Daya

Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya sangat penting untuk keberhasilan penerapan kebijakan, seperti yang dinyatakan oleh Derhticks dalam Van Meter dan Van Horn (1975), "*new town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the program failure.*" Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga sangat penting untuk menentukan keberhasilan penerapan kebijakan.

Sumber daya manusia dan finansial yang memadai memastikan kemajuan program. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan di BPKAD Kab. Jayawijaya mendapatkan hasil bahwa SDM yang ada perlu meningkatkan kemampuan atau kapasitasnya dalam menerapkan sistem ini dikarenakan sistem ini akan terus berkembang, seperti hasil wawancara dengan Bapak Kabid Akuntansi mengatakan bahwa:

*“Kemudian sumber daya yang ada harus disiapkan, untuk hal meningkatkan kapasitas. Teman-teman di SKPD perlu belajar karena sistem ini terus berkembang, ilmu keuangan terus berkembang, dan menu didalam sistem ini juga terus berkembang. Sehingga peningkatan kapasitas dari SDM sangat diperlukan”(KI 5, 23 Agustus 2023)*

Kendala lain juga ditemukan berdasarkan hasil penelitian yaitu kendala dalam hal sumber daya berupa sarana prasarana seperti jaringan yang kurang memadai sehingga menjadi salah satu kekurangan atau kendala dalam pengoperasian sistem berbasis web ini.

*“Jaringan karena mengakses sistem ini kita harus menggunakan jaringan, di Wamena ini kan jaringan tidak menentu. Seperti saat ini lagi putus-putus untuk mengakses sistem ini menjadi sulit karena jaringan yang kurang baik”(KI 4, 22 Agustus 2023)*

*“Nah makanya sedikit menghambat kita itu dari sisi jaringan. Jadi kalau dilihat sistem ini sebenarnya sangat membantu sekali, sangat menolong.”(KI 7, 23 Agustus 2023)*

Kendala sumber daya lain yang ditemukan adalah pada sistem itu seperti yang di utarakan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD dan Kepala BPKAD Kab. Jayawijaya bahwa:

*“Cuma ada beberapa kendala yaitu apabila kita ada kesalahan kita harus melapor ke Kementrian. Kalau aplikasi yang kami punya dulu kalau ada kesalahan kita bisa hapus sendiri, kalau SIPD tidak bisa demikian karena semuanya satu data jadi kita harus melapor ke Kementrian nanti Kementrian yang hapus.”(KI 4, 22 Agustus 2023)*

*Misalnya bendahara ingin mengetik angka 110 tapi dia salah ketik 101, merubah ini bayangkan mau merubah 1 digit angka saja kita harus minta izin ke Kemendagri. Jadi sisi efisien yang tadi diawal itu tidak efisien, efektif tidak efektif.(KI 2, 22 Agustus 2023)*

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dan sumber daya berupa jaringan dan sistem ini belum optimal atau sedang dalam tahap pengembangan. Sehingga didalam melaksanakan sistem ini bila ada kesalahan harus melapor ke pusat karena menggunakan sistem data mengalir jadi satu data atau satu pintu.

1. Karakteristik organisasi pelaksana

Karena organisasi pelaksana, yang terdiri dari organisasi formal dan informal, sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan, hasilnya akan sangat dipengaruhi oleh organisasi pelaksana selaku eksekutor. Kerjasama sangat penting untuk menjalankan suatu program kegiatan dan mewujudkan kordinasi yang jelas dan teratur. Dengan ini BPKAD bertanggung jawab untuk menjalankan proses implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, individu atau pihak yang terlibat di dalamnya bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Berdasasrkan hasil penelitian karakteristik dari pada organisasi pelaksana dapat dikatakan baik sesuai dengan kondisi dan keadaan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kaban meskipun dengan kendala yang ada yaitu tidak adanya sosialisasi sebelum ditetapkannya sistem ini organisasi pelaksana tetap berupaya untuk menjalankan sistem ini:

*“Kami belajar sendiri (otodidak), pembinaan dari Kemendagri tidak pernah ada. Kami awal mulanya itu ketika anggaran harus menyusun APBD terpaksa kami bentuk tim antara BAPPEDA dan BPKAD kami pergi kepusat, meminta waktu dari orang pusat untuk belajar. Karena mereka juga sibuk mengurus 1 Republik Indonesia. Jadi kita minta mereka waktu 1 hari untuk belajar sama-sama, kalau pelatihan khusus tidak pernah ada.”(KI 2, 22 Agustus 2023)*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permendagri 70 tahun 2019 diterapkan diseluruh Republik Indonesia maka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi sangat penting untuk hubungan yang ada antara dua atau lebih organisasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah diputuskan. Kelancaran komunikasi kelompok adalah kunci implementasi, menurut temuan penelitian dan komentar dari berbagai sumber. Meskipun dalam penerapan sistem ini masih banyak terdapat kendala seperti saat terjadi kesalahan dalam penginputan harus melapor kepada pusat dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut harus menunggu konfirmasi dari pusat yang memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, argumen ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Ibu Sekretaris BPKAD Kab. Jayawijaya:

*“Sebenarnya sistem ini sangat membantu, kelemahannya ketika kita ada salah input untuk memperbaikinya kita harus melapor lagi ke pusat dan untuk menunggu konfirmasi atau respon dari pusat kita harus mengunggu. Karena jawaban dari mereka adalah kami bukan hanya melayani 1 atau 2 kabupaten, akhirnya kita harus menunggu berminggu-minggu bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Jadi sebenarnya kendalanya juga ada disitu, semua kabupaten ditangani oleh pusat.”(KI 3, 21 Agustus 2023)*

*”Misalnya bendahara ingin mengetik angka 110 tapi dia salah ketik menjadi 101, merubah ini bayangkan mau merubah 1 digit angka saja kita harus minta izin ke Kemendagri. Jadi sisi efisien yang tadi diawal itu tidak efisien, efektif tidak efektif.”(KI 2, 22 Agustus 2023).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi kurang efektif dikarenakan kendala yang sudah dibahas yaitu jika terjadi kesalahan maka harus melapor ke Pusat dan membutuhkan waktu yang lama untuk pihak pusat dapat memperbaiki. Untuk itu diharapkan adanya solusi untuk menjawab kendala atau permasalahan yang terjadi dilapangan saat ini.

1. Disposisi dan sikap para pelaksana

Kesuksesan program bergantung pada kualitas pelaksana. Dari hasil penelitian ini masih ada keterlambatan hal ini menyebabkan masalah dalam penatausahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kabid Akuntansi bahwa:

*“Kalau 3 tahapan itu sudah terjadi kita su tidak bisa rubah apa-apa lagi, makanya tingkat ketelitian kemampuan SDM itu yang sangat diperlukan dalam mengelola dan menerapkan aplikasi ini. Ketika sudah salah input dari awal itu akan berdampak pada inputan berikut. Jadi semua tergantung pada SDM, SDM ini sangat berpengaruh.”*

*“Contohnya begini disini ada transaksi tunjangan Papua, tapi disana tidak ada begitu. Ada tunjangan-tunjangan khusus disini yang tidak terakomodir didalam sistem ini makanya kita komunikasi untuk ditambahkan menunya beda seperti itu.”(KI 5, 23 Agustus 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala berdasarkan hasil wawancara dilapangan bersama beberapa narasumber. Maka dari itu pemerintah pusat atau Kementrian selaku pembuat sistem harus cepat menyikapi dan melakukan perbaikan agar proses kinerja pemerintahan daerah tidak terkendala karena masih banyak kekurangan dalam sistem.

1. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Masalah dan kegagalan dalam penerapan kebijakan dapat terjadi dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak menguntungkan; sebagai hasilnya, upaya penerapan kebijakan membutuhkan lingkungan eksternal yang menguntungkan. Berdasarkan hasil observasi pada objek penelitian meskipun kondisi sosial, politik dan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya kurang kondusif. Namun demikian proses bekerja pada instansi tetap berjalan sebagaimana mestinya.

*“Kalau itu iya, tetapi persoalannya SIPD yang ada sekarang itu belum sempurna. Jadi bukannya mempermudah dan menolong tetapi menyulitkan kami. SIPD yang ada ini belum digunakan baik, belum berjalan dengan baik sudah mau diganti lagi dengan SIPD yang baru yaitu SIPD RI.”(KI 2, 22 Agustus)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan hal-hal seperti yang disebutkan pada poin 4 yaitu komunikasi antar organisasi yang terhambat karena jika ada kesalahan dalam penginputan harus menghubungi pihak pusat yang memakan waktu lama, maka dapat menimbulkan gejala atau faktor dalam hal ekonomi, sosial, dan politik.

1. **Bagaimana Capaian Penerapan SIPD terhadap Pelaporan Keuangan**

Terdapat 3 indikator dalam teori efektifitas yaitu, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Efektifitas SIPD dalam menunjang pelaporan keuangan sebagai berikut.

1. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan Permendagri No.70 tahun 2019, SIPD didirikan dengan tujuan untuk membuat layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi secara elektronik yang dapat diakses melalui situs web jaringan resmi Kementrian Dalam Negeri. Hal ini juga diharapkan dapat mencapai efektifif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel dalam penerapannya agar dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan proses penyusunan pelaporan keuangan. Berikut adalah beberapa pernyataan dari informan:

*“Kalau SIPD ini saya lihat sudah sangat mempermudah penyusunan laporan, baik OPD dan keuangan”(KI 1, 21 Agustus 2023)*

*“Untuk sementara berjalan dengan baik. Untuk gaji dan LS itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik hanya kita kedalanya ada di jaringan. Sebenarnya sangat membantu sekali”(KI 3, 21 Agustus 2023)*

“*Jadi dari sisi efisien tercapai, efektif? Lebih efektif begitu jadi saya sampaikan ini untuk menjawab ke 5 unsur tadi. Karena sifatnya langsung, kemudian penggunaan SIPD ini kalau koneksinya bagus itu bisa digunakan dimana saja. Betul, hari ini saya menginput transaksi hari ini saya kerja dimana saja walaupun transaksinya itu di Jayawijaya saya bisa input di Jakarta efisiensi begitu. Lalu dari sisi keamanan semua menggunakan user sesuai dengan tupoksinya atau tugas pokok dan fungsi diatur didalam SIPD.”(Kabid Akuntansi BPKAD Kab. Jayawijaya, 23 Agustus 2023)*

*“Secara ini sudah terbukti ya, karena kita punya pekerjaan yang selama ini panjang sekarang sudah jauh lebih mudah, lewat aplikasi kita buat laporannya lebih cepat.”(KI 4, 23 Agustus 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa dengan penerapan SIPD ini tugas informan selaku Kabid Perbendaharaan sudah semakin mudah dan ringan, yang tadinya memakan waktu lama dalam mengoreksi administrasi dari OPD dengan sistem ini OPD mengoreksi sendiri melalui PPK-SKP memverifikasi sehinnga mempermudah rentang kendali dalam proses pengelolaan keuangan.

Penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Jayawijaya saat ini sudah menggunakan ketiga menu utama yang tersedia pada SIPD yaitu perencanaan, penatausahaan sampai pada informasi pemerintah lainnya. Pada bidang keuangan sudah mengunakan SIPD sepenuhnya mulai dari penganggaran sampai pada pelaporan keuangan. Namun terdapat kendala yaitu kurang efisien dalam penerapannya dimana jika terjadi salah penginputan pengguna SIPD harus melapor ke pusat dan untuk menunggu konfirmasi atau jawaban untuk perbaikan dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan. Sehingga diharapkan untuk kedepannya ada solusi yang dapat Pemerintah pusat berikan untuk menangani kendala seperti ini.

1. Integrasi

Pengukuran integrasi adalah seberapa baik Anda dapat berkolaborasi, berkomunikasi, dan sosialisasi dengan orang-orang dari berbagai organisasi. Bedasarkan hasil penelitian, untuk sosialisasi dari Kemendagri belum pernah ada, dan komunikasi antar kedua belah pihak yaitu pemerintah daerah dan pusat dalam hal SIPD sedikit terkendala. Hal ini dibenarkan melalui wawancara bersama beberapa informan:

*“Kalau mau dibilang Bimtek juga tidak ada, ya kami belajar secara otodidak, kami belajar dari buku dan sekarang kan zaman sudah canggih ya kami bisa belajar juga dari Youtube.”(KI 4, 23 Agustus 2023)*

*“Kami tidak punya kerja sama dengan siapa-siapa, tidak ada. Kami otodidak semuanya belajar, anggaran belajar sendiri, penatausahaan belajar sendiri, Aklap (Akuntansi Pelaporan) belajar sendiri. Tidak ada pendamping, kami dari dulu tidak ada konsultan semua kami belajar sendiri.”(KI 2, 23 Agustus 2023*)

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas bahwa pelaporan keuangan kabupaten Jayawijaya selama ini belajar sendiri dalam menerapkan peraturan yang diturunkan dari pusat untuk melakukan atau menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan.

1. Adaptasi

Adaptasi adalah bagaimana setiap orang menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Proses adaptasi SIPD di BPKAD Kabupaten Jayawijaya saat ini terbilang sangat baik, Jayawijaya telah menggunakan ke 3 menu yang disediakan Kemendagri dalam sistem ini. Meskipun terkendala dengan jaringan dan penetapan penggunaan SIPD tanpa adanya sosialisasi namun tanggapan dari ASN atau pelaku-pelaku SIPD sangat terbilang baik, para pelaku beradaptasi dan mempelajari sistem yang ditetapkan pemerintah.

Walaupun pada saat ditetapkan penggunaan sistem ini tidak ada sosialisasi sebelumnya seperti yang tertulis didalam LKjIP BPKAD Tahun 2021 “Pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 wajib menggunakan aplikasi SIPD tanpa didahului sosialisasi oleh Kementerian Dalam Negeri”.

Meskipun demikian pelaku pelaksana SIPD di Kab. Jayawijaya tetap ingin belajar dan melaksanakan SIPD hal ini dibenarkan oleh Bapak Kaban:

*“Kami tidak punya kerja sama dengan siapa-siapa, tidak ada. Kami otodidak semuanya belajar, anggaran belajar sendiri, penatausahaan belajar sendiri, Aklap (Akuntansi Pelaporan) belajar sendiri. Tidak ada pendamping, kami dari dulu tidak ada konsultan semua kami belajar sendiri.*

*Seluruh Papua yang menggunakan SIPD Cuma 3 Jayawijaya, Yapen, dan Dogiay selebihnya masih menggunakan SIMDA. Mereka menggunakan SIPD hanya ditahapan perencanaan dan penganggaran, tapi penatausahaan sama akuntansi pelaporan semua masih pakai SIMDA. Kalau kami disini full menggunakan SIPD.”(KI 2, 22 Agustus 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa seluruh OPD di Kabupaten Jayawijaya berupaya menyesuaikan diri dan mau belajar untuk menggunakan SIPD dalam penerapan pengelolaan keuangan disetiap instansi masing-masing walaupun tanpa sosialisasi dan Bimtek dan jaringan yang kurang memadai. Namun mereka giat memacu diri mau belajar untuk mencapai hasil yang baik dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Jayawijaya.

1. **Kendala yang dihadapi Selama Penerapan SIPD**

Adapun faktor penghambat atau kendala-kendala yang dialami selama proses penerapan SIPD yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Penerapan SIPD perlu diperhatikan khususnya seluruh pegawai yang mengoperasikan harus lihai dan teliti dalam pengoperasian sistem. Mengingat bahwa SIPD mempunyai sistem ibarat air mengalir dari daerah ke pusat, maka SDM yang digunakan juga harus teliti dalam mengoperasikan sistem ini.

*“Sementara ini kan kita masih mempelajari, tidak semua tapi mungkin ada 1 atau 2 orang, kami yang lain masih dalam tahap pembelajaran”(KI 3, 21 Agustus 2023)*

*“Kalau untuk memenuhi ada beberapa yang sudah memenuhi, tetapi ada beberapa yang memang belum bisa.”(KI 4, 22 Agustus 2023)*

Dari hasil wawancara diatas, sebagian besar pegawai sudah dapat mengoperasikan SIPD dalam pengelolaan keuangan.

1. Jaringan

Jaringan di daerah pegunungan yang terbilang jelek bukan hal baru lagi, dalam penerapan sistem ini daerah membutuhkan kualitas jaringan yang baik mengingat sistem bisa dioperasikan jika jaringan yang tersedia memadai untuk menopang proses penginputan dan penyajian laporan.

“*Kesulitannya disini itu jaringan, jadi jaringan internet tidak bisa kita tidak bisa mengaplikasikan aplikasi ini.”(KI 1, 21 Agustus 2023)*

*“Jaringan karena mengakses sistem ini kita harus menggunakan jaringan, di Wamena ini kan jaringan tidak menentu. Seperti saat ini lagi putus-putus untuk mengakses sistem ini menjadi sulit karena jaringan yang kurang baik”(KI 4, 22 Agustus 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang menjadi kendala dalam proses penerapan adalah jaringan yang kurang memadai sehingga menghambat proses administrasi pengelolaan keuangan.

1. Menu SIPD Belum Maksimal

Menu yang tersedia di SIPD lebih luas dan rumit, namun penyediaan menu belum maksimal dalam penerapannya. Contohnya seperti di Papua terdapat transaksi tunjangan, namun menu untuk transaksi yang satu ini belum tersedia dikarenakan hal ini tidak ada di daerah pusat.

*“Contohnya begini disini ada transaksi tunjangan Papua, tapi disana tidak ada begitu. Ada tunjangan-tunjangan khusus disini yang tidak terakomodir didalam sistem ini makanya kita komunikasi untuk ditambahkan menunya beda seperti itu.”(KI 5, 23 Agustus 2023)*

Sesuai dengan hasil wawancara belum ada pemerataan tunjangan pegawai yang termuat dalam menu yang disajikan dalam SIPD. Tunjangan di Pusat dan di daerah ada perbedaan, seperti didalam menu SIPD tidak ada menu tunjangan Papua.

1. Keterlambatan Perbaikan dari Pusat

Karena *device* SIPD berada di pusat, kesalahan input tidak dapat dihapus atau diulang karena inputnya langsung ke sistem. Akibatnya, karena pusat mengawasi dan mengontrol sistem, perbaikan harus diajukan ke pusat. Pemerintah daerah hanya dapat berkolaborasi melalui WhatsApp dan pusat respons, yang dapat memakan waktu berbulan-bulan untuk memperbaiki kesalahan penginputan yang sangat lama*.*

*“Ketika kita ada salah input untuk memperbaikinya kita harus melapor lagi ke pusat dan menunggu waktu. Karena jawaban dari mereka adalah kami bukan hanya melayani 1 atau 2 kabupaten, akhirnya kita harus menunggu berminggu-minggu bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Jadi sebenarnya kendalanya juga ada disitu, semua kabupaten ditangani oleh pusat.”(KI 3, 21 Agustus 2023)*

*“Karena kemarin kita sampaikan aplikasi ini Bapak-Bapak mereka buat tapi kalau semuanya harus konfir ke Bapak-Bapak sekian banyak daerah ini kan akhirnya kita kesulitan dan memang kesalahan ini kan kemarin kita Telepon, Whatsapp sama sekali tidak ditanggapi kecuali face to face baru mereka respon”(KI 7, 23 Agustus 2023)*

*“Persoalannya SIPD yang ada sekarang itu belum sempurna. Jadi bukannya mempermudah dan menolong tetapi menyulitkan kami. SIPD yang ada ini belum digunakan baik, belum berjalan dengan baik sudah mau diganti lagi dengan SIPD yang baru yaitu SIPD RI.(KI 2, 22 Agustus 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa penerapan SIPD masih menggunakan 1 data dari pusat yang ditangani langsung oleh pusat sehingga menghambat proses pekerjaan administrasi pelaporan keuangan. Dalam penanganannya dapat terbilang lama karena semua Kabupaten ditangani oleh pusat sehingga saat melaporkan kesalahan harus mengantri untuk mendapat jawaban perbaikan.

1. **PENUTUP**

Dapat disimpulkan bahwa krieria yang dicapai adalah terwujudnya nilai atau tujuan dari penerapan SIPD yaitu efektif, efisien, ekonomis, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan hasil dan pembahasan melalui keenam indikator, kesimpulannya adalah kriteria sudah berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa faktor penghambat seperti jaringan, eror sistem, dan kurangnya pembinaan. Penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian dari digunakannya SIPD sudah cukup baik berdasarkan ketiga indikator dalam teori Duncan yaitu Pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian kendala yang dihadapi dalam proses penerapan antara lain jaringan, kualitas SDM, Keterlambatan perbaikan dari Pusat, dan menu yang belum sempurna.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini hanya mewawancarai 7 informan, untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa menambah informan dan juga membagikan kuisioner pada OPD yang ada di Kabupaten tempat penelitian. Peneliti tidak dapat mendeskripsikan indikator ke 6 pada teori Implementasi dan pengukuran efektifitas juga kurang optimal untuk mengukur penggunaan suatu sistem.

Berdasarkan kesimpulan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disampaikan beberapa saran yaitu, diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini ditempat yang sama berkaitan dengan hasil pelaporan keuangan yang dihasilkan dari penggunaan SIPD, mengamati penggunaan SIPD, perbedaan penerapan SIPD dengan sistem yang lama, keunggulan dari SIPD. Khususnya bagi pemerintah pusat diharapkan agar dapat memperhatikan daerah pegunungan seperti tempat penelitian yaitu Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten lain yang berada di pegunungan. Diharapkan bahwa sarana seperti pemasangan dan peningkatan jaringan di daerah gunung lebih diperhatikan lagi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agostino. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn.* http//kertyawitaradya.wordpress.

Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi SIstem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Pendidikan Tambusai*, 4036.

Artikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Bumi Aksara.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (2021). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.* Kabupaten Jayawijaya.

Citra, N. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntablitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Doctorial dissertation, IPDN*.

Davis, G. B. (1991). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen.* Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.

Ekaputra, N. D. (2021). Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Nganjuk. *otonomi*, 1.

Grandis, & E. T. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 6* , (103-113).

Gulo, W. (2002). *Metode Penelitian.* Jakarta: PT. Grasindo.

Hutahean, J. (2018). *Konsep Sistem Informasi.* Deepublish.

Indonesia, J. U. (2010). *Buku Pintar Pembelajaran.* Jakarta.

JAYAWIJAYA, B. P. (2023). *KABUPATEN JAYAWIJAYA DALAM ANGKA Jayawijaya Regency in Figures 2023.* Badan Pusat Statistik.

*JDIH BPK RI.* (2023, Mei 06). Retrieved from bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127924/permendagri-no-70-tahun-2019

*LKjIP TAHUN 2021 Kabupaten Jayawijaya.* (2023, Mei 3). Diambil kembali dari jayawijayakab.go.id: https://jayawijayakab.go.id

Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda karya.

Munawir, S. (2014). *Analisa Laporan Keuangan.* Yogyakarta: Liberty.

Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 2.

Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 110.

Papua, B. P. (2023, Mei 21). *Pemprov Papua Kembali Gunakan SIMDA*. Diambil kembali dari bpk.go.id: https://papua.bpk.go.id/pemprov-papua-kembali-gunakan-simda/#

*SAMPOERNA UNIVERSITY*. (2023, Juni 19). Retrieved from sampoernauniversity.ac.id: https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/

Sari, I. M., & Syafina, L. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3*.

Steers, R. M. (1985). *Efektifitas Organisasi (Kaidah Perilaku).* Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: PT Alfabet.

Supardi. (1993). *Populasi Dan Sampel Penelitian.* Unisia.

Suyanto, B., & Sutinah. (2010). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan.* Jakarta: Kencana Prenada.